

**GERAKAN ANTI SWAPRAJA DAN DAMPAKNYA BAGI  
MASYARAKAT MUSLIM DI KASUNANAN SURAKARTA**

**TAHUN 1945-1966 M**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM**  
**FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karebeth Wahyu Firmansyah

NIM : 20101020033

Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Gerakan Anti Swapraja dan Dampaknya bagi Masyarakat Muslim di Kasunanan Surakarta Tahun 1945-1966 M”** adalah hasil dari pemikiran peneliti sendiri bukan dari hasil plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang peneliti gunakan sebagai bahan rujukan dan telah dikutip sesuai dengan kaidah ilmiah penulisan dan tercantum pada daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiat dari hasil karya orang lain, maka segala tanggung jawab ada pada peneliti sendiri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Karebeth Wahyu Firmansyah

NIM. 20101020033

## **NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi berjudul:

### **“GERAKAN ANTI SWAPRAJA DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI KASUNANAN SURAKARTA TAHUN 1945- 1966 M”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Karebeth Wahyu Firmansyah  
NIM : 20101020033  
Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Saya berpendapat, bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menempuh sidang munaqosyah.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Juli 2024

Dosen Pembimbing

Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.

NIP. 19700216 199403 2 013

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1626/Un.02/DA/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : "Gerakan Anti Swapraja dan Dampaknya bagi Masyarakat Muslim di Kasunanan Surakarta Tahun 1945-1966 M"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KAREBETH WAHYU FIRMANSYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20101020033  
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c99182a7fc4



Pengaji I

Dr. Maharsi, M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 66c9fe574a5cc



Pengaji II

Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 66c99894e0915



Yogyakarta, 15 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Prof. Dr. Muhammad Wildan, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 66ca62ab65fb7

## MOTTO

**“Lahir, Migunani, banjur Mati”**

Sejatinya manusia adalah ia yang terlahir seutuhnya, melewati semua fase kehidupan dengan berani dan penuh tanggung jawab. Sejatinya manusia adalah ia yang berguna untuk makhluk lainnya, mengasihi, merawat, dan menjaganya.

Sejatinya manusia adalah ia yang mengimani setiap jengkal takdir yang dikukuhkan kepadanya: diri sendiri, orang lain, kesempatan dan kematian.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahi Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk bapak yang masih bekerja di hari tuanya, untuk ibu yang menjahit bajubajuku: Wardana dan Tri Wanuti. Halaman ini juga saya tujuhan sebagai ungkapan terimakasih kepada abang saya Aryudha Ernawan, kepada mbak Widha Mutiara Rizky, keponakan: Mikha, dan Meru.

Halaman ini juga saya persembahkan untuk segala yang membersamai saya dalam proses penulisan. Terimakasih kepada keluarga besar Program Studi SKI angkatan 20 dan saudara-sadara di kelas A, kepada keluarga besar Kampus Tiga, kepada Tobacco Cigarettes Shop, kepada The Cloves and The Tobacco, Oasis, yang musiknya senantiasa mengobarkan hati saya untuk terus menulis hingga selesai.

Yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih, kepada saya karena mempercayai diri sendiri. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena telah melakukan semua kerja keras ini, saya ingin berterima kasih kepada saya karena tidak memiliki hari libur. Saya ingin berterima kasih kepada saya, karena tidak pernah berhenti, saya ingin berterima kasih kepada saya karena selalu menjadi pemberi dan mencoba memberi lebih dari yang saya terima. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena telah mencoba melakukan lebih banyak hal benar daripada salah, saya ingin berterima kasih kepada saya karena telah menjadi diri saya sendiri setiap saat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَيْ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسَلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ

وَعَلَيْ آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah, manusia pilihan pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi yang berjudul “Gerakan Anti Swapraja dan Dampaknya bagi Masyarakat Muslim di Kasunan Surakarta Tahun 1946-1966” ini merupakan penelitian untuk memahami sebuah gerakan revolusi di Surakarta dan dampak yang ditimbulkannya. Penelitian skripsi ini banyak mengalami kendala, jika skripsi ini akhirnya selesai, maka hal itu bukan karena usaha peneliti sendiri, melainkan atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Wardana dan Ibu Tri Wanuti selaku kedua orang tua peneliti, yang telah membesar, mendidik, mendoakan dan memberi dukungan tiada henti kepada peneliti.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.
4. Ketua dan Sekertaris Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam.
5. Dra. Himayatul Ittihadiah, M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk yang sangat bernilai kepada peneliti dalam penyusunan judul skripsi ini.
6. Ibu Zuhrotul Latifah, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik dan telah membantu peneliti dalam diskusi pemilihan judul skripsi ini.
7. Seluruh dosen Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, dan segenap Tata Usaha Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.
8. Teman-teman “Kampus Tiga” di SKI angkatan 2020, Haris, Galih, Farez, Fajrul, Billy, Damar, Elas, Zuhdi, Jalu, Ambon, Marimo, Hilmi, Zama, Nadhif, Mujahidin, Iswan dan juga teman-teman kuliah peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Teman-teman di Rumah, Nova, Sikkin, Alfin, Agung, Rizki, Andika, Afrisal, Najib, Suwandi yang senantiasa menemani canda tawa penulis

10. Yang terkasih, Elma Qurrota A'yun
11. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas itulah skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Yogyakarta, 24 Juli 2024



Karebeth Wahyu Firmansyah  
NIM. 20101020033



## **Gerakan Anti Swapraja dan Dampaknya bagi Masyarakat Muslim di Kasunanan Surakarta Tahun 1945-1966 M**

### **Abstrak**

Runtuhnya birokrasi tradisional Surakarta disebabkan oleh peristiwa revolusi yang dinamakan Gerakan anti swapraja, sebuah gerakan yang berakar dari paham komunis. Pada saat revolusi Surakarta terjadi masyarakat yang mayoritas muslim juga mendukung berlangsungnya revolusi, karena terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi antara keluarga kerajaan dengan rakyat biasa di Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses keruntuhan birokrasi tradisional di Kasunanan Surakarta serta dampak bagi masyarakat muslim pasca gerakan tersebut. Pentingnya penelitian ini adalah mendeskripsikan sebuah gerakan anti swapraja dan revolusi Surakarta yang kurang dipahami oleh masyarakat, karena minimnya tulisan yang memuat tentang swapraja dan gerakan anti swapraja, maka dari itu penulis berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana gerakan anti swapraja tumbuh di tengah-tengah masyarakat hingga berhasil menjatuhkan birokrasi Kasunanan Surakarta.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer berupa naskah dan surat kabar dari ANRI dan perpustakaan di Solo Raya, kemudian sumber sekunder yang berupa buku yang relevan serta melakukan wawancara kepada masyarakat yang merupakan keturunan dari pelaku sejarah sekitar Kraton Surakarta yang mempunyai korelasi dengan sejarah revolusi Surakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio kultural yang memahami nilai-nilai dan pemahaman yang dilandaskan terhadap suatu kelompok masyarakat serta memahami perubahan yang terjadi di masyarakat, kemudian teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Materialisme Historis, yang merujuk pada ide, argumen, hipotesis, serta spekulasi penulis untuk menggambarkan keadaan kelompok masyarakat. Dalam prosesnya peneliti menggunakan metode sejarah yang dimulai dari pengumpulan sumber (heuristik), melakukan kritik sumber, interpretasi sumber, dan yang terakhir menuliskan hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan anti swapraja di Surakarta tidak hanya berfokus pada masalah sosial-ekonomi saja, tetapi juga aspek politik yang menjadikan Surakarta sebagai basis oposisi karena Yogyakarta menjadi Ibu Kota Negara. Hasil lain yang ditemukan adalah usaha-usaha masyarakat untuk revolusi, dan dampak setelah revolusi.

**Kata Kunci:** Birokrasi Tradisional, Kasunanan Surakarta, Masyarakat muslim;

Anti swapraja; Surakarta.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : KONDISI SURAKARTA MENJELANG GERAKAN ANTI SWAPRAJA.....</b>	<b>14</b>
A. Tanah Swapraja: Birokrasi Tradisional Surakarta .....	14
B. Keadaan Sosial Politik di Kasunanan Surakarta .....	19
C. Penyebab Munculnya Gerakan Anti Swapraja di Kasunanan Surakarta	24
<b>BAB III : GERAKAN REVOLUSI ANTI SWAPRAJA DI SURAKARTA .....</b>	<b>30</b>
A. Ideologi Komunisme .....	30
B. Berlangsungnya Gerakan Anti Swapraja .....	36
C. Jatuhnya Birokrasi Tradisional Surakarta .....	38
<b>BAB IV : DAMPAK GERAKAN ANTI SWAPRAJA DI SURAKARTA ...</b>	<b>42</b>
A. Demokratisasi Pemerintahan Surakarta .....	42
B. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kraton .....	45
C. Meningkatnya Partisipasi Politik Rakyat di Bawah Sistem Pemerintahan Baru.....	53
<b>BAB V : KESIMPULAN .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>81</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada masa kolonial Belanda, Surakarta merupakan daerah *vorstenlenden* atau daerah swapraja, yaitu daerah yang berhak memerintah daerahnya sendiri (*zelfbesturende landscappen*). Pemerintahan Surakarta memiliki peraturan yang dimuat dalam perjanjian antara Gubernur Jenderal dan Sri Sunan yang dikenal dengan istilah *Politiek Contract* (Kontrak Politik) sehingga membedakan Surakarta dengan daerah lain yang peraturannya berdasarkan Undang-Undang. Kontrak politik terbagi menjadi 2 macam, yaitu: *lang contract* (kontrak panjang) tentang kesamaan kedudukan atau kekuasaan antara kerajaan asli daerah dengan Belanda, dan *korte verklaring* (pernyataan pendek) tentang pengakuan atas kekuasaan Belanda. Kasunanan dan Kasultanan diatur dalam *lang contract* sementara Mangkunegaran dan Pakualam diatur dalam *korte verklaring*.<sup>1</sup>

Kasunanan Surakarta adalah wilayah otonom yang dipimpin oleh seorang sultan atau sunan sebagai kelanjutan dari sistem pemerintahan kerajaan Mataram Islam. Bahkan Keraton Surakarta pernah menjadi pusat pemerintahan, kebudayaan, kesenian, perekonomian, tata nilai, tuntutan hidup keagamaan dan merupakan representasi kosmologi Jawa pada jamannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Samroni, Heny Astiyanto, dkk, *Daerah Istimewa Surakarta*, Yogyakarta: Pura Pustaka Yogyakarta, 2012, hal. 305

<sup>2</sup> Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah Kerajaan Islam yang disebut sebagai Kerajaan senior yang berdiri tahun 1775 setelah perjanjian Giyanti. Kasunanan Surakarta juga dipercaya oleh para tokoh keraton sebagai pewaris utama dalam kebudayaan dan kesenian Mataram Islam, terbukti

Maklumat Sri Sunan Paku Buwono XII tertanggal 1 September 1945 menyatakan bahwa Negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang pemerintah pusat negara Republik Indonesia. Pada tanggal 6 September 1945 pemerintah Republik Indonesia memberi piagam kedudukan kepada Sri Susuhunan Paku Buwono XII yang di dalamnya berisi keterangan bahwa wilayah Surakarta Hadiningrat merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Piagam ini ditandatangani Soekarno tertanggal 19 agustus 1945.<sup>3</sup>

Penerimaan piagam tersebut ternyata tidak berdampak terlalu baik bagi pemerintahan Sunan Paku Buwono XII setelah kemerdekaan, justru muncul ketimpangan antara kehidupan keraton dan masyarakat biasa yang cukup mencolok antara kehidupan di keraton dengan kehidupan di masyarakat. Kondisi tersebut kemudian memunculkan suatu pergolakan di tengah masyarakat hingga membangkitkan protes sosial menuntut kesetaraan. Pergolakan tersebut berisi protes masyarakat yang menuntut untuk kesetaraan kondisi sosial.<sup>4</sup> Pergolakan tersebut kemudian menjadi sebuah gerakan revolusi yang disebut anti swapraja atau *anti feudal* dipimpin oleh tokoh sosialis-komunis ternama di Indonesia, yaitu Tan Malaka.<sup>5</sup>

---

dengan diwariskannya Tarian Bedhaya Ketawang yang sebelumnya dimiliki oleh Kasultanan Mataram Islam.

<sup>3</sup> Ibid, hal. 307

<sup>4</sup> Paku Buwono XII diangkat menjadi raja setelah ayahnya Paku Buwono XI meninggal pada tahun 1944, paku Buwono XII Ketika bertakhta masih berumur belasan tahun. Paku Buwono XII belum cakap dalam memimpin sebuah negara dan sangat kurang minatnya dalam berpolitik. Keadaan ini menjadikan ketimpangan hidup antara Keraton dan masyarakat biasa yang menyalaikan api revolusi dibawah kepemimpinan Tan Malaka.

Gerakan anti swapraja adalah sebuah momentum yang berasal dari respon masyarakat terhadap sisa-sisa feodal kolonial. Gerakan ini dapat diartikan sebagai anti feodal atau menuntut sistem masyarakat tanpa kelas yang membedakan antara kerajaan dan masyarakat biasa. Swapraja merujuk kepada daerah pemberian pemerintahan kolonial kepada raja-raja di bekas tanah jajahannya, termasuk Kasunanan Surakarta yang merupakan pecahan dari Mataram Islam setelah Perjanjian Giyanti tahun 1755. Gerakan anti swapraja di kasunanan Surakarta berlangsung selama satu tahun yang dimulai pada tahun 1945 hingga runtuhan birokrasi tradisional di Surakarta tahun 1946, yang berakibat dikeluarkannya UU. No. 16/SD/1946 yang berisi dihilangkannya status daerah Istimewa Surakarta.<sup>6</sup>

Pada masa awal revolusi tahun 1945 terdapat *double bestuur* (pemerintahan ganda) sehingga menimbulkan kesalah pahaman antara Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) dengan pemerintah kerajaan yang sudah mendapat pengakuan dari pemerintah.<sup>7</sup> Selama revolusi berlangsung, Tan Malaka sebagai dalang dari gerakan revolusi mendapat dukungan dari tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia yang berpaham Nasionalis Sosialis Agamis Komunis (NASAkom).<sup>8</sup> Begitu juga masyarakat muslim yang turut menyuarakan anti feodal dengan tuntutan kesetaraan kehidupan antara keraton dan masyarakat biasa yang bisa dikatakan serba susah untuk hidup layak.

---

<sup>6</sup> George D. Larson, *Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta*, 1990, Yogyakarta: UGM Press.

<sup>7</sup> Purwadi dan Djoko Dwiyanto, *Kraton Surakarta*, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2008, hal. 5

<sup>8</sup> Devi Ariyanti, Skripsi: "Sikap Kasunanan Surakarta dalam Mengatasi Gerakan Anti Swapraja di Surakarta tahun 1945-1946", Bandung: UPI, 2013, hlm. 11

Masyarakat muslim pada saat itu juga merasa bahwa Paku Buwono XII seperti boneka mainan ibunya yang mempengaruhi segala kesenangan pribadi daripada kepentingan rakyatnya. Masyarakat Muslim hidup dengan segala keterbatasan karena pada saat Paku Buwono XII naik takhta, sang sultan masih berumur belasan tahun dan belum berpengalaman dalam politik sehingga belum pantas untuk mengurus suatu negara.

Permasalahan semakin bertambah yang semula hanya permasalahan sosial kemudian meluas dengan berkobarnya api revolusi dari masyarakat yang sudah tidak tahan dengan kepemimpinan raja muda yang minim pengalaman. Ditandai dengan diculiknya Sunan Paku Buwono XII beserta ibunya, dan dibunuhnya Patih Sosrodiningrat pada tanggal 20 Januari 1946 menjadikan revolusi dianggap berhasil saat itu. Tanggal 15 Juli 1946 Kasunanan Surakarta gagal mengembalikan daerah swapraja dan daerah istimewa, pemerintahan pun dikembalikan kepada rakyat dan militer di bawah kepemimpinan Kolonel Sutarto.<sup>9</sup> Pentingnya penelitian ini adalah mendeskripsikan sebuah gerakan yang lahir dari ide usungan dari Tan Malaka dengan paham sosialis-komunis yang pada saat itu merupakan paham yang berpengaruh di Jawa. Penelitian ini juga menjabarkan sebuah ide gerakan yang kurang dipahami oleh khalayak luas, dan karena minimnya tulisan yang memuat tentang swapraja dan gerakan anti swapraja maka dari itu penulis berusaha untuk mendeskripsikan

---

<sup>9</sup> Julianto Ibrahim, *Bandit dan Pejuang di samping Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*, Wonogiri: Bina Citra Pustaka, 2004, hlm. 110

bagaimana gerakan anti swapraja tumbuh di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Surakarta.

### **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini mengkaji tentang kondisi masyarakat muslim pasca gerakan anti swapraja di Surakarta tahun 1945. Fokus kajian penelitian ini terpusat pada faktor munculnya gerakan tersebut dan akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat muslim di wilayah Surakarta. Peneliti membatasi waktu yang dimulai pada tahun 1945 ketika gerakan tersebut muncul. Penelitian diakhiri pada tahun 1966 ketika terjadi pemberontakan G30S/PKI, karena melemahnya PKI dan telah dimulainya orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Agar pembahasan lebih terfokus maka permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengapa muncul gerakan anti swapraja dan bagaimana situasi terakhir Surakarta menjelang berlangsungnya gerakan anti swapraja?
2. Bagaimana proses berlangsungnya gerakan anti swapraja di Surakarta?
3. Bagaimana dampak dan kondisi masyarakat muslim setelah gerakan anti swapraja di Surakarta berlangsung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan keadaan kasunanan dan kota Surakarta sebelum berlangsungnya gerakan anti swapraja.

2. Untuk mendeskripsikan sebab munculnya Gerakan dan babak akhir dari tujuan yang diusung oleh gerakan anti swapraja di Kasunanan Surakarta.
3. Untuk menjelaskan kondisi masyarakat muslim setelah berlangsungnya gerakan anti swapraja dari aspek sosial dan ekonomi di Kasunanan Surakarta.

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai kondisi masyarakat muslim pasca gerakan anti swapraja di Surakarta.
2. Menambah wawasan tentang sejarah di Surakarta berkaitan dengan gerakan anti swapraja yang pernah terjadi.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan terkait gerakan anti swapraja di Surakarta.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini berangkat dari bacaan karya-karya terdahulu yang di dalamnya memuat informasi terkait *vorstenlanden* dan dinamikanya. Penelitian ini membahas tentang salah satu daerah *vorstenlanden* yang merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram Islam. Tulisan yang penulis dapatkan sebagai berikut:

Pertama; *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta* karya Darsiti Suratman, buku yang diterbitkan oleh Yayasan Penerbitan Taman Siswa di Yogyakarta tahun 1989. Buku ini memaparkan kehidupan dunia kraton, yang membahas tentang bangunan kraton, Riwayat kraton sebagai bentuk pemindahan dari kraton yang lama di Kartasura, dan tentang masyarakat yang hidup di bawah

kekuasaan kraton. Perbedaan antara buku ini dan penelitian penulis terletak pada tema, yaitu penulis mendeskripsikan suatu gerakan yang mempengaruhi aspek setelah terjadinya revolusi.

Kedua; *Dunia Swapraja: Sketsa Sistem Pemerintahan, Agraria, dan Hukum*karya G. P. Rouffer dan disadur oleh M. Husodo Pringgokusumo, buku ini diterbitkan oleh Kasan Ngali di Yogyakarta tahun 2021. Buku ini berjudul asli *Vorstenlanden* yang memaparkan sistem pemerintahan kerajaan, system pertanahan dan agraria, serta sistem hukum dan keamanan di wilayah *vorstenlanden* atau swapraja di Indonesia. Kesamaan isi buku dan penelitian penulis terletak pada deskripsi geografinya, sedangkan kebaruan yang penulis sajikan adalah penambahan skema jumlah penduduk di Surakarta masa dinamika politik.

Ketiga; “Kehidupan Politik di Surakarta dan Kejatuhannya“ yang ditulis oleh Sutiyah dalam jurnal *Paramita: Historical Studies* Vol.27, No. 2, Universitas Negeri Semarang tahun 2017. Artikel ini membahas tentang sepak terjang politik yang dilakukan oleh Tan Malaka dan orang-orang yang terlibat dalam pergolakan politik Surakarta tahun 1945-1946. Persamaan artikel dan tulisan penulis adalah pembahasan tentang politik, tetapi terdapat hal yang membedaan artikel ini dan penelitian penulis, terkait kemajuan politik di Surakarta setelah revolusi.

Keempat; “Pemilihan Umum 1955 di Surakarta dan Yogyakarta“ yang ditulis oleh Sutiyah, dalam Repository Universitas Gadjah Mada tahun 2017. Dalam salah satu babnya membahas tentang wilayah *vorstenlanden* yang

mempunyai nasib yang berbeda. Artikel ini memaparkan tentang wilayah penduduk dan masyarakat, warisan tradisi kerajaan, serta revolusi dan perubahan. Isi artikel dan penelitian penulis adalah kesamaan pada spek pemilihan umum serentak tahun 1955.

Kelima; “Keruntuhan Birokrasi Tradisional di Kasunanan Surakarta“ yang ditulis oleh Muhammad Anggie Farizqie dalam Jurnal *Handep: Sejarah dan Budaya* Vol. 2, No. 2, tahun 2019, yang membahas tentang faktor-faktor keruntuhan birokrasi dalam kraton dan daerah wilayahnya, di dalamnya juga dibahas sedikit terkait kehidupan masyarakat secara umum setelah keruntuhan birokrasi Surakarta 1946. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penulis berfokus pada kondisi masyarakat muslim setelah gerakan anti swapraja di Surakarta dari aspek sosial dan ekonominya, karena penelitian terdahulu hanya membahas tentang politik dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu penulis mengambil judul yang mempunyai fokus utama pada Masyarakat Muslim di Kasunanan Surakarta setelah gerakan anti swapraja dari aspek sosial dan ekonomi.

#### E. Kerangka Teori

Dalam penelitian diperlukan pendekatan dan teori yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memahami objek yang dikaji. Landasan teori merupakan jalan pemikiran menurut kerangka yang logis untuk mengungkapkan dan menunjukkan masalah-masalah yang telah didefinisikan. Landasan teori sebagai penuntun dalam memecahkan dan merenungkan masalah serta berguna untuk merumuskan hipotesis. Teori juga merupakan

seperangkat kaidah yang memandu sejarawan dalam menyelidiki masalah yang akan diteliti, dalam menyusun bahan-bahan yang telah diperolehnya dari analisis sumber dan juga dalam mengevaluasi hasil penemuannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-kultural, yaitu pendekatan dengan memahami nilai-nilai yang dilandaskan pada masyarakat yang ada dalam pembahasan, serta upaya perubahan perilaku masyarakat dengan menggunakan aspek-aspek sosial dan budaya yang hidup di masyarakat setempat. Peneliti berusaha untuk mempelajari kondisi suatu masyarakat sehingga dapat ditemukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi dan kultural adalah ilmu yang memfokuskan untuk memperhatikan masyarakat yang bersifat umum dan berusaha mendapatkan serta memahami pola-pola umum yang terjadi dan muncul di kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori materialisme historis, merujuk pada ide, argumen, hipotesis, eksperimen pemikiran, dan spekulasi penjelas tentang pandangan sejarah dialektik dalam proses kerja dan laju perkembangan ekonomi dan sosial.<sup>11</sup> Teori adalah bagian penting dari kerangka yang digunakan untuk mengatur fenomena sosial tertentu dalam ilmu sosial. Penerapan teori tersebut digunakan untuk melihat sejarah dari sudut pandang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Muslim di Kasunanan Surakarta pasca gerakan anti swapraja, dengan penekanan bukan kesadaran

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Rawali Press, 2017

<sup>11</sup> Karl Marx, *Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis*, Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2013.

manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi keadaan sosial mereka yang menentukan kesadaran masyarakat.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Heuristik

Dalam langkah heuristik ini, peneliti menggunakan sumber primer berupa arsip-arsip yang berada di wilayah karesidenan Surakarta termasuk Perpustakaan Daerah Boyolali, Perpustakaan Daerah Surakarta, Perpustakaan Kasunanan Surakarta, dan Museum Radya Pustaka yang berisi data jumlah penduduk beserta agama yang dipeluk masyarakat Kota Surakarta tahun 1946, kemudian politik di Surakarta. Adapun untuk sumber sekunder, peneliti menemukan data berupa buku yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Selain itu, peneliti juga menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik kondisi masyarakat muslim pasca gerakan anti swapraja di Surakarta. Peneliti mengakses karya ilmiah tersebut melalui situs e-journal, repository berbagai universitas, dan lain-lain. Sebagai data pendukung, peneliti juga menelusuri situs internet yang menyediakan sumber-sumber relevan dengan topik penelitian.

### 2. Verifikasi

Verifikasi atau kritik sumber yakni melakukan pengecekan atas sumber yang didapatkan melalui kritik ekstern dan kritik intern. Kritik

---

<sup>12</sup> *Ibid*

ekstern merupakan pengecekan terhadap keabsahan suatu sumber. Adapun kritik intern adalah mengecek keshahihan atau kredibilitas sumber yang telah didapatkan. Dalam metode ini, peneliti melakukan kritik ekstern dengan mengutamakan sumber primer melihat aspek luar atau fisik sumber seperti nama pengarang, nama penerbit atau jurnal, tempat terbit, tahun terbit, gaya bahasa serta ejaan yang digunakan apakah sumber tersebut absah atau tidak. Adapun untuk kritik intern, peneliti membandingkan isi antar sumber-sumber yang diperoleh serta dikritisi apakah informasi di dalamnya terjamin kredibilitasnya atau tidak.<sup>13</sup>

### 3. Interpretasi

Interpretasi juga disebut sebagai penafsiran sejarah. Terdapat dua metode yang digunakan dalam metode ini, yakni analisis dan sintesis. Analisis (menguraikan) sejarah bertujuan untuk menyatukan (sintesis) terhadap sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta tersebut ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh.<sup>14</sup> Dalam metode ini, peneliti menafsirkan data-data yang didapatkan dengan cara menggabungkan data-data yang didapatkan mengenai pengaruh gerakan anti swapraja di Surakarta. Selanjutnya, peneliti menguraikan dan menganalisa sumber-sumber tersebut sehingga tampak jelas apa saja yang menjadi sebab dan akibat dari

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 105

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 111

gerakan swapraja bagi masyarakat muslim di Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan teori sosial

#### 4. Historiografi

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Penulisan hasil penelitian sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak awal perencanaan hingga hasil akhir kesimpulan.

### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis secara sistematis sebagaimana karya ilmiah lainnya.

Peneliti membaginya menjadi lima bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Pembahasan dalam bab I menjadi penjelasan pokok dan dasar pemikiran untuk pembahasan bab-bab setelahnya. Hasil penelitian selanjutnya akan dijabarkan dalam empat bab berikutnya.

Bab II membahas tentang situasi menjelang gerakan anti swapraja di Surakarta tahun 1945 berlangsung. Bab ini meliputi gambaran umum lokasi munculnya gerakan, serta bagaimana kondisi sosial dan kondisi politik. Tujuan pembahasan pada bab ini adalah memberikan gambaran awal mengenai keadaan wilayah dan munculnya gerakan yang dijadikan bahan penelitian.

Bab III memuat pembahasan tentang adanya gerakan anti swapraja yang muncul dan meluas di Kasunanan Surakarta. Pembahasan bab ini meliputi

pengaruh politik serta faktor yang mempengaruhi berkobarnya api revolusi anti swapraj di Surakarta.

Bab IV memaparkan tentang dampak dari gerakan anti swapraja yang berhasil dilakukan, terutama keadaan masyarakat muslim di Surakarta setelah gerakan anti swapraja berlangsung. Bab ini berisi babak baru bagi masyarakat muslim dalam aspek ekonomi dan social di bawah pemerintah yang baru dengan konsep pemerintahan dikembalikan kepada rakyat dan militer.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, terdapat saran sebagai masukan yang dapat digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Swapraja adalah sebutan untuk tanah kerajaan pada masa kolonial, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) istilah swapraja memiliki makna sebagai tanah-tanah kerajaan. Dalam bahasa Belanda, istilah swapraja berasal dari kata *Vorstenlanden* yang berarti tanah kerajaan yang mengacu pada kerajaan-kerajaan yang berdiri di tanah Yogyakarta dan Surakarta pada masa kolonial Hindia Belanda. Secara sederhana, swapraja mengacu kepada tanah yang diberikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada raja-raja Jawa yang memerintah saat itu agar ia dapat mengelolanya sesuai instruksi dan determinasi pemerintah kolonial.

Sistem swapraja merupakan sebuah sistem yang sangat istimewa, terutama bagi seorang raja. Sistem swapraja sudah ada sejak zaman kolonial Hindia Belanda, sistem yang lahir setelah perjanjian Giyanti ini mampu bertahan selama berabad-abad dan terus lestari hingga masa kemerdekaan. Sistem swapraja lahir atas campur tangan pihak kolonial Hindia Belanda guna memecah belah kekuasaan dan mempermudah pengawasan jika saja kerajaan tradisional melakukan pemberontakan. Wilayah swapraja mendapatkan mandat untuk dipimpin seorang raja atau sultan tradisional yang secara hukum menguasai seluruh tanah di wilayah kekuasaan, hal tersebut membuat kedudukan yang sangat sentral bagi struktur kerajaan.

Kedudukan raja Kasunanan sendiri misalnya, kedudukan kekuasaan raja Kasunanan di daerah Swapraja sendiri diimbangi oleh seorang Gubernur dari pemerintah Hindia Belanda, sesuai dengan perjanjian bahwa daerah Swapraja

mempunyai hak untuk mengatur rumah tangga sendiri. Struktur birokrasi tradisional ini dipegang oleh para putra sentana dan para kerabat kerajaan atau dikenal dengan istilah priyayi. Pada masa tersebut paham feodalisme mulai tertanam sangat kuat di kalangan masyarakat jawa.

Secara historis, birokrasi yang muncul dan berkembang di Kasunanan Surakarta Hadiningrat mempunyai ciri khas mewarisi sistem nilai tradisional yang tumbuh di masa kerajaan-kerajaan masa lampau dan bercampur dengan birokrasi gaya kolonial serta ide-ide modern. Birokrasi tradisional Surakarta sendiri mengacu kepada dua penguasa wilayah yang berdiri pada saat itu, kekuasaan tersebut dibagi menjadi wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan wilayah Praja Mangkunegaran. Masing-masing wilayah kekuasaan tersebut dibagi lagi menjadi tanah raja atau swapraja dan tanah praja dimana tanah raja dimiliki oleh Kasunanan Surakarta Hadiningrat seluas 4/5 wilayah swapraja yang terdiri dari: Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sragen yang kemudian dikenal sebagai tanah swapraja atau karesidenan Surakarta.

Keadaan sosial politik Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebelum terjadi pemberontakan anti swapraja cukup beragam. Penduduk yang multietnis, mendukung daerah Surakarta memiliki interaksi yang unik antara masing-masing etnis. Interaksi etnis Jawa dengan Arab tidak memiliki banyak masalah. Etnis Jawa memiliki keterbukaan dan bisa menerima etnis Arab dalam segala aktivitasnya. Orang-orang keturunan Arab sebagian besar dari mereka bergerak dalam bidang ekonomi dan di industri batik. Berbeda dengan interaksi antara etnis Jawa dan etnis

Tionghoa, interaksi keduanya sering menimbulkan masalah dan tidak jarang berupa bentrok fisik. Hal yang paling mencolok dalam kehidupan sosial di daerah Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah keadaan masyarakat bawahnya. Pada saat itu kehidupan masyarakat Surakarta di bawah kekuasaan Sunan Paku Buwono XII bisa dibilang timpang, karena mayoritas masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan terutama masyarakat muslim dari etnis suku Jawa, karena pada saat itu puncak pemegang ekonomi adalah para saudagar Tionghoa dan Arab yang menjalankan bisnis tekstil batik di wilayah Surakarta, sementara penduduk asli Jawa menjadi pekerja di pabrik-pabrik batik.

Kondisi politik pada awal pemerintahan Pakubuwono XII hampir bersamaan dengan lahirnya Republik Indonesia. Seperti diketahui, Pakubuwono XII naik takhta hanya sekitar dua bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Segera setelah proklamasi kemerdekaan, Kasunanan Surakarta menyatakan wilayahnya merupakan bagian dari Republik Indonesia. Masa Pakubuwono XII mulai masuklah paham-paham komunis terutama dari PKI untuk menggalang suara dan simpatisan. Masa ini menjadi titik balik bagi Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang terus menerus mengikuti perintah kolonial Hindia Belanda yang notabene menimbulkan rasa kekecewaan yang dalam. Masyarakat beranggapan bahwa Sunan Pakubuwono hanyalah alat atau boneka Kolonialis dan keluarganya, mengingat umur sunan yang masih sangat belia sehingga memunculkan perspektif buruk di tengah rakyat Surakarta. Kemunculan mosi tidak percaya kepada sultan dan adanya ketimpangan di kehidupan sosial ekonomi, golongan kiri mengadakan perlawanan melalui sebuah gerakan yang dikenal sebagai gerakan anti swapraja.

Gerakan anti swapraja di Surakarta juga disebut sebagai revolusi Surakarta 1946, karena adanya gerakan ini timbul atas kehendak rakyat yang menyerukan berbagai tuntutan kepada pihak keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Revolusi yang berlangsung di Surakarta juga diilhami oleh semangat penghapusan produk kolonialisme di Surakarta, semangat api revolusi yang berkobar di berbagai penjuru Indonesia juga turut mengilhami berjalannya revolusi di Surakarta. Gerakan anti swapraja yang begitu masif dan meluas hingga ke pelosok daerah, berhasil menghimpun kekuatan untuk menjatuhkan birokrasi keraton. Pada tahun 1946 gerakan anti swapraja yang dikomandoi oleh Tan Malaka serta terdiri dari laskar-laskar pejuang berhasil menjatuhkan birokrasi tradisional yang dianut oleh keraton.

Birokrasi tradisional yang berhasil dijatuhkan kemudian berdampak kepada masyarakat terutama masyarakat muslim yang tinggal di Surakarta. Kondisi yang berlangsung setelah revolusi serta merta untuk jatuhnya birokrasi saja, namun banyak dari masyarakat pribumi terutama masyarakat muslim kembali ke pekerjaan awalnya sebagai petani di sawah dan perkebunan, buruh di pabrik, dan berniaga atau menjadi kuli di pasar di wilayah Surakarta. Pemerintahpun bergerak cepat untuk memperbaiki situasi setelah revolusi, dengan melakukan pemberantasan di bidang sosial, ekonomi, dan politik sehingga mampu mendongkrak kualitas hidup masyarakat di Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pemberantasan yang dilakukan tersebut berhasil untuk mempertahankan wilayah Surakarta, namun muncul masalah baru soal pemberontakan PKI di wilayah-wilayah Indonesia. Berita tersebut membuat keresahan dan ketakutan baru bagi masyarakat, terutama

masyarakat muslim yang menjadi korban kekejaman PKI. Puncaknya pada 30 September 1965, PKI melakukan penculikan dan pembunuhan kepada dewan jenderal yang dikenal dengan pemberontakan G30S/PKI di Lubang Buaya. Pemberontakan tersebut berhasil diremdamkan oleh Mayjend. Soeharto dan ia dianugerahi kenaikan pangkat serta menjabat sebagai presiden Republik Indonesia menggantikan Ir. Soekarno pada tahun 1966.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Arsip**

ANRI. Jawatan Penerangan Surakarta: Data tentang masalah swapraja daerah Surakarta 1950. No. 568

ANRI. Kementerian Penerangan : Pidato radio Mr. M. Roem 1946. No. 567

ANRI. Kementerian Penerangan : Data tentang Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat 1947. No. 566

### **Buku**

A.H. Nasution. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid III*. Bandung: Angkasa.

Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

D. Larson, George. 1990. *Masa Menjelang Revolusi Kraton dan Kehidupan Politik Di Surakarta, 1912-1942*. Yogyakarta : UGM Press.

Hadi Rudyatmo, F. X. Hadi. 2013. *Daerah Istimewa Surakarta Dalam Pandangan Pemerintah Kota Surakarta*. Surakarta: Pemerintah Kota Surakarta.

Julianto, Ibrahim. 2010. *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan*. Wonogiri: Bina Citra Pustaka.

Kartodirdjo, Dr. Soeyatno. 1982. *Revolusi Di Surakarta Tahun 1945-1946*. Surakarta: Rekso Pustoko.

Kartodirjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

Larson, George D., 1990. *Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta*. Yogyakarta: UGM Press.

Lubis, M. Solly. 1982. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.

- Mawardi dan Yuliani. 1995. *Dinamika Revolusi Sosial Di Surakarta*. Surakarta: Rekso Pustoko.
- Moedjanto, G. 1987. *Konsep Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mr. Soewidji. 1973. *Kisah Nyata di Pinggir Jalan Slamet Riyadi di Surakarta*. Semarang: Percetakan Universitas Satya Wacana.
- Nurhajarini, Dwi Ratna. Tugas Triwahyono dan Restu Gunawan. 1999. *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*. Jakarta: CV Ilham Bangun Karya.
- Palmier, H. Leslie. 1960. *Social Status and Power in Java*. London: University of London.
- Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer dan Ediat Kamil. 1999. *Kronik Revolusi Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Prasadana, Muhammad Anggie Farizqi. 2019. *Keruntuhan Birokrasi Tradisional Surakarta*. Jurnal Ilmu Sejarah No. 2, Vol 2.
- Prof. Dr. Suhartono W. Pranoto. 2001. *Revolusi Agustus: Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Purwadi dan Dwiyanto, Djoko. 2008. *Kraton Surakarta*. Yogyakarta: Panji Pustaka.
- R. T. M. Husodo Pringokusumo. 1989. *Memori Van Overgave*. Surakarta: Rekso Pustoko.
- Reid. Antony. 1996. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rouffaer, G. P. 1983. *Dunia Swapraja diterjemahkan oleh M. H. Pringgokusumo*. Surakarta: Kasangali.
- Rouffer, G. P. 2021. *Dunia Swapraja: Sketsa Sistem Pemerintahan, Agraria, dan Hukum*. Yogyakarta: Kasan ngali.
- S. Margana. 2004. *Kraton Surakarta Dan Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Samroni, Imam dkk. 2010. *Daerah Istimewa Surakarta: Wacana Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta Ditinjau dari Perspektif Historis, Sosiologis, Filosofis & Yuridis*. Yogyakarta: Pura Pustaka.
- Samroni, Imam, Astiyanto, Heny, dkk. 2012. *Daerah Istimewa Surakarta*. Yogyakarta: Pura Pustaka Yogyakarta.
- Santoso, Sri juari. 2006. *Suara Nurani Keraton Surakarta*. Yogyakarta: KSD
- Shiraishi, Takahashi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soebagijo I.N. 1981. *Pejuang Tanpa Henti*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soemarsaid Moertono. 1985. *Negara dan Bina Usaha Negara di Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Soeratman, Darsiti. 1989. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta tahun 1830-1839*. Yogyakarta: Taman Siswa.
- Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Supomo. 1957. *Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suratman, Darsiti. 1989. *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Taman Siswa.
- Taufik Abdullah, dkk. 1983. *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Wasino. 2014. *Modernisasi Di Jantung Budaya Jawa*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

### **Jurnal**

- Alfian. 1977. “Tan Malaka: Pejuang Revolucioner yang Kesepian”. *Prisma* No. 8, Agustus 1977. Padang: Balai Pelestarian Budaya Sumatera Barat.

- Farizqie, Muhammad Anggie. 2019. "Keruntuhan Birokrasi Tradisional di Kasunanan Surakarta". *Jurnal Handep: Sejarah dan Budaya* Vol. 2, No. 2. Semarang: Universitas Semarang.
- Sutiyah. 2017. "Kehidupan Politik di Surakarta dan Kejatuhannya". *Jurnal Paramitha: Historical Studies* Vol. 27, No. 2. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

### **Skripsi**

Ariyanti, Devi. 2013. *Sikap Kasunanan Surakarta dalam Mengatasi Gerakan Anti Swapraja di Surakarta tahun 1945-1946*. Bandung: UPI.

Rosiana, Belda Ranika. 2013. *Terbentuknya Birokrasi Modern Di Surakarta*. Skripsi: Fakultas Sastra dan Seni Rupa Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Utamawan, Andi Nurma. 2010. *Pemerintah Darurat Militer Surakarta Dan Dampaknya Terhadap Pemerintahan Kota Surakarta*. Skripsi: Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Mukri Pawirdja (63) di sekitar kompleks Kraton Surakarta pada tanggal 16 Maret 2024.

Wawancara dengan Hadi Martono (54) di sekitar kompleks Kraton Surakarta pada tanggal 18 Maret 2024.

Wawancara dengan Kusuma Ramadhani (32) di sekitar kompleks Kraton Surakarta pada tanggal 16 Maret 2024.